Journal of Economics Research and Policy Studies, 6(3), 2026, 891-906
Available at: https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps
E-ISSN: 2797-8141

Dinamika indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali dalam perspektif upah minimum kabupaten/kota, PDRB, dan inflasi

Ni Kadek Ayu Kastariani, I Gde Wedana Arjawa*, Ita Sylvia Azita Azis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: arjawa@warmadewa.ac.id)

Abstract

This study aims to analyze the effects of the Regency/City Minimum Wage (UMK), Gross Regional Domestic Product (GRDP), and inflation on public welfare proxied by the Human Development Index (HDI) in Bali Province. This study is motivated by previous research that has produced mixed findings regarding the influence of macroeconomic variables on HDI, particularly in regions that are highly dependent on the tourism sector. This research contributes empirical evidence by examining the relationship between UMK, GRDP, and inflation and HDI at the regency/city level during the post-pandemic economic recovery period of 2020–2024. The study employs secondary panel data obtained from Statistics Indonesia, covering nine regencies/cities with a total of 45 observations. Panel data regression analysis was conducted using EViews 13, and the Random Effect Model was selected as the best-fitting model. The results indicate that UMK has a positive and significant effect on HDI. GRDP does not affect HDI, while inflation has a positive and significant effect on HDI. These findings suggest that wage policies and inflation dynamics more strongly influence improvements in public welfare in Bali than by aggregate economic growth.

Keywords: Regency/City Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, Inflation, Human Development Index.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap IPM, khususnya pada daerah yang bergantung pada sektor pariwisata. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui analisis hubungan UMK, PDRB, dan inflasi terhadap IPM pada tingkat kabupaten/kota selama periode pemulihan ekonomi pascapandemi 2020–2024. Data yang digunakan berupa data panel sekunder dari Badan Pusat Statistik yang mencakup 9 kabupaten/kota dengan 45 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 13 dan menghasilkan Random Effect Model sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. PDRB tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan upah dan dinamika inflasi lebih kuat memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi agregat.

Kata kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia.

How to cite: Kastariani, N. K. A., Arjawa, I. G. W., & Azis, I. S. A. (2026). Dinamika indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali dalam perspektif upah minimum kabupaten/kota, PDRB, dan inflasi. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *6*(3), 891–906. https://doi.org/10.53088/jerps.v6i3.3222

Copyright © 2026 by Authors; this is an open-access article under the CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

1. Pendahuluan

Pembangunan suatu daerah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun IPM Bali secara konsisten berada dalam kategori "Tinggi" dibandingkan dengan rata-rata nasional, tantangan mendasar masih ada, terutama dalam bentuk ketidakmerataan pencapaian antara daerah, khususnya antara wilayah pariwisata dan kawasan pertanian. Data menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi setelah pandemi berlangsung dengan cepat, masih ada kerentanan sosial yang dihadapi oleh sebagian penduduk yang bergantung pada sektor informal dan pariwisata. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah di Provinsi Bali.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/kota	Capaian IPM	Kategori/Status IPM
Kota Denpasar	85,22	Sangat Tinggi
Kab. Badung	83,87	Sangat Tinggi
Kab. Gianyar	79,82	Tinggi
Kab. Tabanan	78,42	Tinggi
Kab. Jembrana	74,60	Tinggi
Kab. Buleleng	74,52	Tinggi
Kab. Klungkung	74,04	Tinggi
Kab. Bangli	71,34	Tinggi
Kab. Karangasem	69,74	Sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025

Data dalam Tabel 1 menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengkategorian IPM dalam tabel tersebut mengacu pada standar klasifikasi BPS (2020), yaitu: Sangat Tinggi (IPM ≥ 80), Tinggi (70 ≤ IPM < 80), Sedang (60 ≤ IPM < 70), dan Rendah (IPM < 60) Perbedaan kategori IPM mencerminkan variasi capaian pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang menjadi komponen utama pembentuk IPM (United Nations Development Programme [UNDP], 2020). Daerah yang berada pada kategori lebih tinggi mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, yang didukung oleh akses yang lebih memadai terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan kategori yang lebih rendah menunjukkan masih adanya keterbatasan pada aspek-aspek tersebut. Daerah agraris atau pinggiran di Bali umumnya menghadapi tantangan dalam hal lapangan kerja formal, yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam capaian pembangunan manusia antar wilayah (Santoso, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan manusia di Bali belum sepenuhnya merata dan masih memerlukan upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam ranah kebijakan daerah, ketidakseimbangan pada standar hidup yang layak ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pada tahun 2024, UMK tertinggi di Bali ditetapkan di Kabupaten Badung sebesar Rp3.318.628, sementara UMK terendah berada di

Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.813.672 selisih lebih dari Rp500.000 yang secara nyata membedakan daya beli dan akses layanan dasar masyarakat antardaerah (BPS Provinsi Bali, 2025). UMK berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang meningkatkan daya beli masyarakat sehingga memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, jaminan upah yang memadai menjadi instrumen krusial dalam memperkuat kapabilitas dasar manusia untuk mencapai kesejahteraan di level mikro (Sen, 1999).

Selain upah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 9,31% pada tahun 2020 akibat terhentinya aktivitas pariwisata selama pandemi COVID-19. Seiring pulihnya sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi Bali kembali meningkat menjadi 5,71% pada tahun 2023 dan 5,48 % pada tahun 2024. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih cenderung terkonsentrasi pada wilayah berbasis pariwisata sehingga kesenjangan pembangunan dengan daerah berbasis agraris masih menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali). PDRB yang tinggi seharusnya berkorelasi positif dengan ketersediaan infrastruktur publik seperti sekolah dan rumah sakit, yang dibiayai oleh pendapatan daerah. Namun, sering kali pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa distribusi yang merata tidak secara signifikan meningkatkan IPM, sehingga kolaborasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menjadi aspek penting yang perlu diteliti lebih lanjut.

Di sisi lain, kestabilan harga atau tingkat inflasi memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai nyata dari pendapatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah mengalami tekanan inflasi yang relatif tinggi pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi, inflasi Bali kembali terkendali pada tahun 2024 sebesar 2,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga masih menjadi faktor penting yang memengaruhi daya beli masyarakat dan pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Bali. Inflasi yang tidak terkontrol, terutama pada barang kebutuhan pokok dan energi, dapat merusak daya beli warga Bali yang telah terbebani oleh biaya hidup yang tinggi di kawasan pariwisata. Tekanan inflasi yang sangat tinggi dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi pengeluarannya di sektor non-pangan, termasuk dalam aspek pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya bisa menghalangi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel makroekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pratama dan Ariza (2024) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, hubungan antara PDRB dan IPM masih diperdebatkan (Agus et al., 2026) menemukan pengaruh positif, sementara Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa tingginya PDRB tidak selalu meningkatkan IPM akibat ketimpangan distribusi pendapatan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh variabel ekonomi terhadap pembangunan manusia sangat bergantung pada karakteristik ekonomi dan struktur pembangunan masing-

masing daerah. Pada Provinsi Bali yang memiliki struktur ekonomi berbasis pariwisata dan sedang berada dalam fase pemulihan pascapandemi, hubungan tersebut penting untuk dikaji kembali. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum menguji pengaruh UMK, PDRB, dan inflasi secara simultan pada tingkat kabupaten/kota selama periode transisi 2020–2024.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis simultan pengaruh UMK, PDRB, dan inflasi terhadap IPM pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode pemulihan ekonomi pascapandemi 2020–2024. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antara wilayah berbasis pariwisata dan wilayah agraris di Bali. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UMK, PDRB, dan inflasi terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2020–2024.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan Human Development Theory sebagai grand theory. Teori yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan dikembangkan oleh Sen (1999) menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan manusia bertujuan memperluas kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Konsep tersebut sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, faktor ekonomi seperti UMK, PDRB, dan inflasi diperkirakan memengaruhi kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur berbasis komponen kualitas hidup yang digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan. Menurut UNDP (2020), IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam perspektif *Human Development Theory*, peningkatan kualitas hidup tersebut dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengakses sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, variabel UMK, PDRB, dan inflasi diperkirakan berperan dalam menentukan capaian IPM antar kabupaten/kota di Bali.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah merupakan kompensasi berupa uang atau bentuk lain yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan standar minimum yang ditetapkan pemerintah daerah untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Menurut Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Becker (1964), peningkatan pendapatan

memungkinkan individu dan rumah tangga melakukan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendapatan yang lebih tinggi memberikan kemampuan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh layanan kesehatan yang memadai, serta mempertahankan keberlanjutan pendidikan anggota keluarga. Dalam konteks pembangunan manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tersebut akan meningkatkan kapabilitas individu yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Temuan Pratama dan Ariza (2024) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Bali yang didominasi sektor jasa dan pariwisata, peningkatan UMK berpotensi meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan sehingga mendorong peningkatan IPM. Schultz (1961) juga menegaskan bahwa investasi pada modal manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan UMK diperkirakan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah upah minimum Kabupaten/kota (UMK) memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Bali (H1).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian serta penciptaan nilai tambah suatu daerah dalam periode tertentu (Izzah & Hendarti, 2021). PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur aktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Solow (1956) menjelaskan bahwa peningkatan output dan pendapatan suatu wilayah merupakan indikator keberhasilan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRB dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas aktivitas produksi dan investasi di suatu daerah. Dalam perspektif pembangunan manusia, peningkatan PDRB tidak hanya berpengaruh melalui peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat PDRB yang tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang merupakan komponen penting pembentuk IPM.

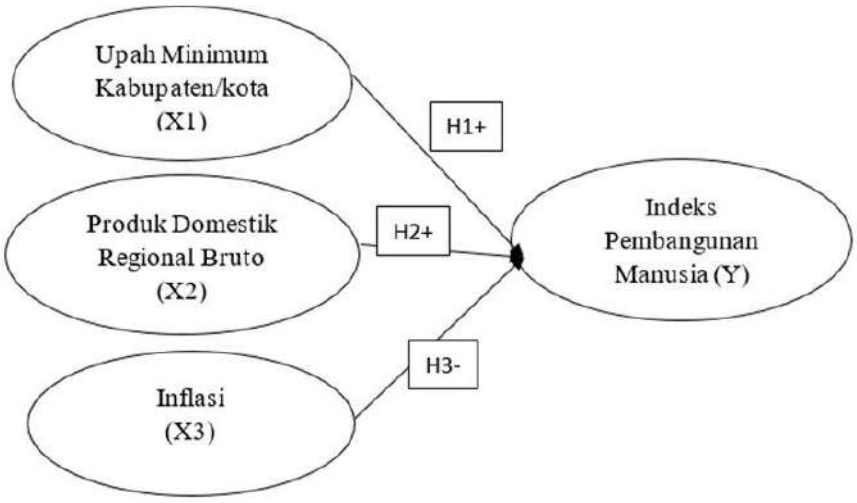
Temuan empiris mengenai hubungan PDRB dan IPM masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa peningkatan PDRB mampu meningkatkan IPM melalui peningkatan pendapatan dan kapasitas fiskal daerah (Agus et al., 2026). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan IPM ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan tidak terdistribusi secara merata (Rahmawati, 2023). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas distribusi hasil pembangunan dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua

dari penelitian ini adalah PDRB memberikan pengaruh positif terhadap IPM di Bali (H2).

Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu (Mankiw, 2019). Dalam perspektif ekonomi makro, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, sehingga kesejahteraan masyarakat ikut menurun. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh inflasi terhadap pembangunan manusia juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sebagian penelitian menemukan bahwa inflasi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena mengurangi daya beli rumah tangga dan membatasi akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Namun, Chitayana & Riofita et al. (2026) menemukan bahwa inflasi yang relatif rendah dan terkendali tidak selalu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap pembangunan manusia sangat bergantung pada tingkat inflasi yang terjadi serta kondisi ekonomi daerah yang menjadi objek penelitian.

Teori Kuantitas Uang yang dikemukakan oleh Fisher (1911) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga secara umum. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi berkurang. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM. Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa tekanan inflasi dapat menghambat akumulasi modal manusia (human capital) yang menjadi komponen penting dalam pembangunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Bali (H3).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

3. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksplanatori (*explanatory research*) dengan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) yang melibatkan 9 Kabupaten/kota sehingga menghasilkan 45 observasi panel (9 unit cross-section x 5 periode time-seriess) Pemilihan data dilakukan karena kelengkapan informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara upah minimum Kabupaten/kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas yaitu Upah Minimum Kabupaten/kota (X1), Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (X2), dan Tingkat Inflasi (X3), serta satu variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Penjelasan operasional masing-masing variabel dijabarkan sebagai berikut: Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Bali diukur dalam satuan (rupiah) per tahun berdasarkan data BPS. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pendapatan minimum pekerja yang ditetapkan pemerintah daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam bentuk (milyar rupiah) menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel ini mencerminkan tingkat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat Inflasi diukur menggunakan data inflasi tahunan (*year-on-year*) dalam bentuk persentase. Variabel ini menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli masyarakat Dalam kurun waktu satu tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. IPM diukur berdasarkan data (indeks) pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali yang mencakup 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

Untuk mengolah data, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel yang mengombinasikan data antarwilayah (*cross section*) dan data runtut waktu (time series). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap variasi antar kabupaten/kota sekaligus perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan software EViews 13. dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} - \beta_3 X3_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

Y_{it}	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
$X1_{it}$	:	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
$X2_{it}$	:	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
$X3_{it}$	:	Inflasi
α	:	Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3$	:	Koefisien variabel independen
ε_{it}	:	Error term

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan, yaitu Analisis data panel dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM) mengasumsikan bahwa seluruh unit *cross-section*

memiliki karakteristik yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan individu maupun waktu yang memengaruhi model, *Fixed Effect Model* (FEM) mengakomodasi adanya karakteristik khusus pada masing-masing unit *cross-section* yang bersifat tetap selama periode pengamatan sehingga perbedaan antarwilayah dapat dikendalikan melalui intercept yang berbeda, dan *Random Effect Model* (REM) mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antarunit bersifat acak dan menjadi bagian dari komponen error model. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji *Chow* untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM, serta uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk membandingkan CEM dan REM. Penentuan model didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05), di mana nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Selanjutnya, dilakukan uji t-statistik untuk mengukur signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F-statistik digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk menguji pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota, PDRB, dan Tingkat Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Estimasi model dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM).

Tabel 2. *Common Effect Model*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	55,27	34,4	1,60	0,11
X1	5,90	3,42	1,72	0,09
X2	0,000192	3,54	5,43	0,00*
X3	-1,60	4,60	-0,03	0,97
R-squared	0,73			
F-statistic	37,68			0,00*

Catatan: **Significant at 5% level*

Setelah melakukan analisis dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), hasil estimasi menunjukkan nilai koefisien PDRB sebesar 0,000192. Nilai desimal yang sangat kecil ini disebabkan oleh perbedaan skala satuan data, di mana variabel PDRB diukur dalam satuan miliar rupiah, sedangkan IPM diukur dalam bentuk indeks skala 1–100. Meskipun demikian, secara simultan model ini signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama memiliki validitas statistik yang kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selanjutnya, untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan efek spesifik dan karakteristik yang unik di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali, analisis dilanjutkan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), Hasil pengujian dengan pendekatan FEM tersebut disajikan pada Tabel 3.

Hasil analisis dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen yang dianalisis bahwa *Probality* <0,05 yang berarti dapat

diketahui bahwa variabel UMK (X1) dan Tingkat Inflasi (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali. Sementara itu, variabel PDRB (X2) menunjukkan arah pengaruh yang negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 3. *Fixed Effect Model*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	47,19	4,24	11,11	0,00
X1	6,50	5,95	10,93	0,00*
X2	-0,000020	1,61	-1,22	0,23
X3	1,54	5,44	2,83	0,00*
R-squared	0,99			
F-statistic	1033,0			0,00*

Catatan: *Significant at 5% level

Selanjutnya dilakukan estimasi analisis Random Effect Model yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. *Random Effect Model*

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	48,32	4,34	11,12	0,00
X1	6,19	5,88	10,52	0,00*
X2	-0,000005	1,56	-0,34	0,73
X3	1,45	5,44	2,66	0,01*
R-squared	0,820			
F-statistic	62,41			0,00*

Catatan: *Significant at 5% level

Model ini menunjukkan signifikansi yang kuat secara statistik. Hasil REM menunjukkan UMK (X1) berpengaruh positif dan signifikan, inflasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan PDRB (X2) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM. Setelah melakukan estimasi menggunakan CEM, FEM, dan REM, langkah selanjutnya adalah menentukan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model yang sesuai dilakukan dengan serangkaian pengujian statistik, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Berikut ini adalah hasil uji Chow yang ditampilkan pada Tabel 5, yang akan digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan model yang paling tepat di antara CEM dan FEM.

Tabel 5. Uji Chow

Effects Test	*Statistic*	*d.f.*	*Prob.*
Cross-section F	374,98	(8,33)	0,00
Cross-section Chi-square	203,43	8	0,00*
Total observations	45		

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka Model CEM ditolak dan model FEM dianggap lebih tepat digunakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk menentukan model yang sesuai antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), Berikut ini adalah hasil uji Hausman yang ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Hausman

Test Summary	*Chi-Sq. Statistic*	*Chi-Sq. d.f.*	*Prob.*
Cross-section random	0,00	3	1,00

Total observations: 45

**Significant at 5% level*

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13

Analisis uji Hausman memperlihatkan nilai probabilitas dari statistik Chi-Square adalah 1.00 lebih besar dari 0,05. Maka Model FEM ditolak dan model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model*. Karena kedua uji statistik ini menunjukkan Hasil yang berbeda, maka uji *Lagrange Multiplier* (LM) perlu dilakukan untuk menetukan Data CEM atau Data REM yang paling sesuai digunakan dalam jurnal ini. Berikut ini adalah hasil uji Lagrange Multiplier yang ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	*Time*	*Both*
Breusch-Pagan	63,25	0,83	64,08
	(0,00*)	(0,36)	0,00*

*Total observations: 45, *Significant at 5% level*

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier memperlihatkan nilai probabilitas Breusch pangan adalah 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Maka hasil CEM ditolak dan Model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model*. Secara keseluruhan Hasil Uji Chow menunjukkan *Fixed Effect Model*, Uji Hausman menunjukkan *Random Effect Model* dan Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan *Random Effect Model*. Berdasarkan ketiga Uji Statistik tersebut, REM dipilih sebagai Model terbaik. Dengan demikian, model regresi data panel yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Random Effect Model. Berikut adalah hasil persamaan regresi berdasarkan estimasi Random Effect Model:

$$Y = 48{,}32 + 6.19X1 - 0{,}000005X2 + 1{,}45X3 \quad (2)$$

Berdasarkan hasil estimasi dengan *Random Effect Model* (REM) yang ditampilkan pada Tabel 4, berikut adalah interpretasi dari hasil analisis model regresi, uji t, uji F, dan R-squared: Upah Minimum Kabupaten/kota dengan nilai koefisien X1 = 6.19, Koefisien UMK sebesar 6,19 menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara UMK dan IPM. Mengingat data UMK diukur dalam satuan rupiah yang bernilai jutaan, interpretasi ekonomis dilakukan berdasarkan perubahan dalam skala yang lebih besar, misalnya kenaikan Rp1.000.000. PDRB dengan nilai koefisien X2 = -0.000005 mencerminkan perbedaan skala satuan antara PDRB (miliar rupiah) dan IPM (indeks 0–100): setiap kenaikan PDRB sebesar Rp1 miliar diestimasi menurunkan IPM sebesar 0,000005 poin, yang secara statistik tidak bermakna (prob. 0,73). Inflasi dengan nilai koefisien X3 = 1.45, memiliki nilai probabilitas 0.01 lebih kecil dari 0.05, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai F-statistic (62.41) dengan probabilitas 0.00 menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen (UMK, PDRB dan Inflasi) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Nilai R-squared (0.82)

mengindikasikan bahwa 82% variasi Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini (UMK, PDRB dan Inflasi). Nilai ini menunjukkan model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabel dependen.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Bali. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui perbaikan kemampuan ekonomi rumah tangga. Kenaikan pendapatan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang merupakan komponen utama pembentuk IPM. Temuan tersebut sejalan dengan *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Becker (1964) dan Schultz (1961), yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan mendorong investasi pada modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, semakin besar peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan IPM.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Pratama dan Ariza (2024) yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Provinsi Bali, pengaruh positif UMK dapat dikaitkan dengan struktur perekonomian yang didominasi sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata yang bersifat padat karya. Pada sektor-sektor tersebut, perubahan tingkat upah memiliki keterkaitan yang relatif langsung terhadap pendapatan rumah tangga sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan dalam bentuk peningkatan konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan upah minimum merupakan instrumen yang mendukung peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Bali.

Berbeda dengan UMK, hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah belum secara langsung mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, serta kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali belum sepenuhnya bersifat inklusif sehingga peningkatan PDRB belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kondisi ini menunjukkan yang dikenal dalam literatur pembangunan regional sebagai "pertumbuhan tanpa inklusi" (*growth without inclusion*), Fenomena ini dapat dipahami melalui karakteristik struktural perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata. Dalam kerangka *Tourism-Led Growth Hypothesis* (Balaguer &Cantavella-Jorda, 2002), pertumbuhan PDRB yang didorong oleh sektor pariwisata tidak selalu ditransmisikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada pelaku usaha skala besar di sektor akomodasi dan jasa keuangan, sementara pekerja informal dan masyarakat di wilayah

yang terletak di tepi, di luar, atau jauh dari pusat seperti Kabupaten Karangasem dan Bangli yang berbasis agraris hanya menerima limpahan (*trickle-down*) yang sangat terbatas. Temuan ini memperkuat Human Development Theory yang dikemukakan oleh Sen (1999), yang menyatakan bahwa peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi akan memperluas kapabilitas individu dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia.

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Badung yang berkontribusi besar pada PDRB Bali tetap mencatatkan IPM tinggi, sedangkan kabupaten agraris dengan kontribusi PDRB rendah justru tertinggal secara konsisten, Hasil serupa juga ditemukan oleh Fatimah et al. (2026) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif menyebabkan peningkatan PDRB tidak selalu diikuti peningkatan pembangunan manusia secara merata. Temuan serupa juga didokumentasikan oleh Melliana dan Zain (2013) serta Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018), yang menemukan bahwa di berbagai provinsi di Indonesia, peningkatan PDRB tidak selalu berkorelasi positif dengan IPM, terutama ketika pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada sektor yang padat modal (*capital-intensive*) dan kurang menyerap tenaga kerja lokal secara inklusif. Rahmawati (2023) secara spesifik membuktikan bahwa PDRB tinggi gagal mendorong IPM ketika terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan, suatu kondisi yang relevan untuk Bali pascapandemi di mana pemulihan sektor pariwisata berlangsung tidak merata. Piketty (2014) dalam kerangka analisis ketimpangan jangka panjang juga berargumen bahwa tanpa intervensi kebijakan redistributif yang aktif, pertumbuhan ekonomi cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan, bukan mempersempitnya. Dalam konteks Bali, hal ini tercermin dari disparitas IPM yang lebar antara Kota Denpasar (85,22) dan Kabupaten Karangasem (69,74) meskipun PDRB provinsi terus tumbuh. PDRB yang meningkat tidak otomatis mendanai penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh kabupaten/kota, karena alokasi belanja publik sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah masing-masing dan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor sosial (Indradewa & Natha, 2015).

Selain Variabel UMK, dan PDRB, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap IPM. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia tidak terbukti secara empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa inflasi yang terjadi selama periode penelitian lebih mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pemulihan sektor pariwisata dibandingkan tekanan biaya hidup yang menurunkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi berkurang. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi pada periode dan wilayah penelitian Inflasi yang terjadi di Provinsi Bali selama periode 2020-2024 masih

berada pada tingkat yang relatif terkendali sehingga tidak menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi justru berlangsung bersamaan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata yang merupakan penggerak utama perekonomian Bali. Kondisi ini menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa sehingga daya beli relatif tetap terjaga. Selain itu, kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki tingkat IPM yang relatif tinggi dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap berlangsung meskipun terjadi kenaikan inflasi. Inflasi pada periode ini lebih mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi daripada tekanan terhadap kesejahteraan

Temuan ini konsisten dengan Teori efek Asea dan Corden (1994) yang menyatakan bahwa inflasi moderat di sektor jasa dapat mencerminkan pertumbuhan produktivitas yang positif, terutama di daerah dengan sektor jasa yang dominan. Agenor (2004) juga menunjukkan bahwa inflasi yang berada dalam kisaran 2–6% per tahun mendukung iklim investasi di sektor sumber daya manusia dan infrastruktur sosial, karena memberikan sinyal permintaan yang positif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian Chitayana & Riofita (2026) mengkonfirmasi bahwa inflasi ringan tidak selalu berdampak negatif pada kesejahteraan jika diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang memadai, terutama di daerah dengan ekonomi jasa yang resiliens. Namun demikian, hasil ini harus dibaca dengan catatan bahwa manfaat inflasi moderat hanya dirasakan secara merata apabila didukung oleh kebijakan pengendalian harga komoditas pokok yang efektif. Jika inflasi bergerak melampaui batas moderat dan menyentuh komoditas pangan dan energi, dampaknya dapat berbalik menjadi negatif bagi kelompok masyarakat berpendapatan tetap, khususnya di wilayah perifer Bali yang daya belinya lebih rentan (Annisa, 2022).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh UMK, PDRB, dan tingkat inflasi terhadap IPM di 9 kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2020–2024 menggunakan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti peningkatan upah minimum berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi agregat di Bali belum mampu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di semua kabupaten/kota. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang dalam konteks Bali sebagai daerah pariwisata mencerminkan bahwa inflasi moderat mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal dan memperkuat daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah Provinsi Bali disarankan untuk mempertahankan kebijakan UMK yang progresif dan memperhatikan wilayah dengan

IPM rendah seperti Karangasem dan Bangli agar manfaat kebijakan upah dapat menjangkau seluruh wilayah. Untuk mendorong kontribusi PDRB terhadap kesejahteraan, diperlukan model pertumbuhan yang lebih inklusif melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal dan peningkatan alokasi belanja publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Terkait inflasi, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu menjaga inflasi tetap pada kisaran moderat dengan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok agar manfaatnya tidak menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan data hanya meliputi 9 kabupaten/kota dalam 5 tahun (2020–2024) sehingga jumlah observasi relatif terbatas; peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode atau memperluas cakupan ke provinsi lain. Kedua, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti kemiskinan, pengangguran, atau belanja pemerintah di sektor sosial untuk meningkatkan daya penjelas model. Ketiga, variabel inflasi yang digunakan merupakan data inflasi umum tahunan. peneliti selanjutnya dapat menggunakan data inflasi per komponen (pangan, perumahan, dan transportasi) untuk mengidentifikasi jalur transmisi yang lebih spesifik terhadap IPM.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Warmadewa, dosen pembimbing, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali atas dukungan, fasilitas, dan penyediaan data untuk penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi serta menjadi referensi bagi akademisi, pemangku kebijakan, dan penelitian selanjutnya.

Referensi

Agenor, P. R. (2004). *The economics of adjustment and growth* (2nd ed.). Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/books/9780674015784

Agus, A. J., Toto, T. W., Sutina, S., & Iramdan, I. (2026). Optimalisasi Potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pementasan Kemiskinan di Kotamadya Bogor. *Sosio E-Kons*, 18(2), 307-317. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v18i2.2955

Annisa, N. (2022). Pengaruh inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 12–24. http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v5i1.3164

Asea, P. K., & Corden, W. M. (1994). The Balassa-Samuelson model: An overview. *Review of International Economics*, 2(3), 191–200. https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.1994.tb00040.x

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Provinsi Bali dalam Angka 2025*. BPS Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Metode Baru Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik.

Balaguer, J., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case. *Applied Economics*, 34(7), 877–884. https://doi.org/10.1080/00036840110058923

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Columbia University Press. https://www.nber.org/books-and-chapters/human-capital-theoretical-and-empirical-analysis-special-reference-education-first-edition

Chitayana, J., & Riofita, H. (2026). Analisis Hubungan Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4697–4708. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1007

Fatimah, S., Haryanto, T., Solihin, A., & Fathurrahman, M. A. (2026). Dampak Indikator Sosial-Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Pdrb Regional Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024. *Jurnal Konstanta*, 5(1), 236-250. https://doi.org/10.29303/konstanta.v5i1.3258

Fisher, I. (1911). *The purchasing power of money: Its determination and relation to credit, interest and crises*. Macmillan. https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshPPM.html

Indradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/14385

Izzah, C.I. & Hendarti, I.M. (2021). Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat upah, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 99–106. https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3392

Mankiw, N. G. (2019). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.

Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis statistika faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan regresi panel. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(2), D237-D242. http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/4844/1385

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674369542

Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 218-240. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663

Pratama, A., & Ariza, A. (2024). Dampak belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1338–1350. https://al-haramjournal.com/index.php/EKOMA/article/view/3769

Rahmawati, D. (2023). PDRB dan IPM: Ketimpangan distribusi pendapatan sebagai mediator. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 45–58. https://repository.radenintan.ac.id/43320/

Santoso, E., & Kasih, S. W. A. (2024). Model Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia: Pendekatan Spasial. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(2), 85-96. https://doi.org/10.29407/jae.v9i2.22356

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17. https://www.jstor.org/stable/1818907

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 70*(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson. https://dvmtextbooks.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/09/economic-development-todaro-and-smith.pdf

United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. UNDP. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020